

**ANALISIS KETIMPANGAN DI JAWA BARAT TAHUN 2001-2017**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Yogie Nugroho

Nomor Mahasiswa : 12313264

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**ANALISIS KETIMPANGAN DI JAWA BARAT TAHUN 2001-2017**

**SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1 Program Studi Ilmu Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Yogie Nugroho

Nomor Mahasiswa : 12313264

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi prodi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapat sanksi yang berlaku.”

Yogyakarta,

Penulis



Yogie Nugroho

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS KETIMPANGAN DI JAWA BARAT TAHUN 2007-2017**

Ditulis oleh :

Nama : Yogie Nugroho

NIM : 12313264

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 17 November 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing,



(Akhsyim Afandi, Drs., MA. Ec., Ph.D.)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL  
**ANALISIS KETIMPANGAN DI JAWA BARAT TAHUN 2007-2017**

Disusun Oleh : **YOGIE NUGROHO**  
Nomor Mahasiswa : **12313264**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada hari Kamis, tanggal: 16 Januari 2020

Pembimbing Skripsi : Akhsyim Afandi, Drs., MA., Ph.D.  
Penguji : Suharto, SE., M.Si.  
Penguji : Diana Wijayanti, Dra., M.Si.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## **MOTTO**

*Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. (Winston Churchill)*

*Everything you can imagine is real. (Pablo Picasso)*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu memberi suport serta do'anya:

1. Bapak dan Ibu tercinta, motivator dan pahlawan untukku yang tak pernah berhenti mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Tak pernah cukup aku membalas cinta dan kasih sayang Bapak dan Ibu.
2. Adikku tersayang, yang selalu mendo'akan dan memberi semangat kepadaku di saat aku mengeluh dan merasa pesimis.
3. Saudara-saudaraku, yang selalu mendo'akan dan dukungan kalian sehingga aku bisa dengan lancar mengerjakan skripsi ini.
4. Teman satu angkatan Ilmu Ekonomi, yang membantuku dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
5. Teman-teman KKN, yang selalu mengingatkan agar aku tidak malas untuk mengerjakan skripsi.
6. Teman-teman yang tak bisa aku sebutkan satu persatu terimakasih untuk semuanya.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya penulis sampai saat ini masih diberikan kenikmatan tiada ternilai harganya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Ketimpangan di Jawa Barat Tahun 2007-2017 yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dorongan, bantuan, dan kritik membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

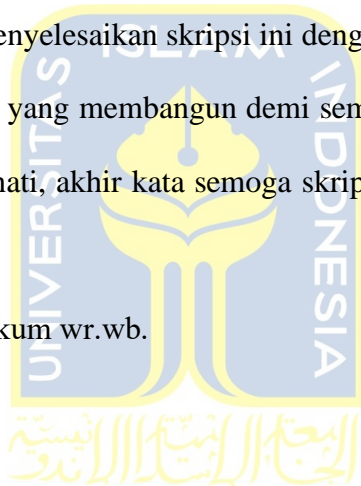
1. Bapak Akhsyim Afandi, Drs., MA.Ec., Ph.D. pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan petunjuk arahan serta saran-saran yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia terimakasih atas kebaikan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.
3. Orang tua dan keluargaku, terimakasih atas kasih sayang, perhatian, bimbingan, ketulusan dan kesabaran, dalam menemani penulis, dan memberikan semangat, disaat penulis mengalami keterpurukan, semoga Allah membalas dengan banyak pahala yang melimpah. Amin.



4. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2012, terimakasih atas bantuan kerjasama dan kenangan yang telah diberikan.
5. Sahabat-sahabatku tercinta Cahya, Yoga Supriyanto, Sharah, Dwiky, Khasan Mahbub, Rio Rananda, Rama Dimas, Geladis Pertiwi, Vebry Ardiansyah dan Nisa Darmanto sebagai tempat berbagi canda tawa dan sedih terimakasih atas motivasi, bantuan dan do'a kalian.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik tenaga, pikiran, materiil dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini di terima dengan senang hati, akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iv
Berita Acara Ujian Skripsi .....	v
Halaman Motto .....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Halaman Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Halaman Abstraksi .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori .....	13
2.2.1 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah .....	13
2.2.2 Ketimpangan antar Propinsi .....	15
2.2.3 Teori Ketimpangan Wilayah .....	1a5
2.2.4 Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah .....	17
2.2.5 Macam-macam Belanja Pemerintah .....	20

2.2.6 Pengaruh Pengeluaran Negara Terhadap Perekonomian .....	22
2.2.7 Pertumbuhan Ekonomi.....	24
2.2.8 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	24
2.2.9 Teori Subsidi .....	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
2.4 Hipotesis .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	29
3.1.1 Jenis Data .....	29
3.1.2 Pengumpulan Data.....	29
3.2 Definisi Variabel Penelitian.....	30
3.2.1 Variabel Dependen .....	30
3.2.2 Variabel Independen.....	30
3.3 Teknik Analisis Data .....	31
3.3.1 Pemilihan Model .....	32
3.4 Evaluasi Hasil Regresi .....	33
3.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	33
3.4.2 Uji F .....	34
3.4.3 Uji T .....	34
3.5 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.5.1 Multikolinieritas .....	35
3.5.2 Heteroskedastisitas .....	36
3.5.3 Autokorelasi .....	37
<b>BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>

4.1 Deskripsi Data Penelitian .....	38
4.2 Hasil dan Analisis .....	38
4.2.1 Hasil Regresi .....	38
4.3 Evaluasi Hasil Regresi .....	39
4.3.1 Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	39
4.3.2 Uji F .....	39
4.3.3 Uji T .....	40
4.4 Uji Asumsi Klasik .....	41
4.4.1 Multikolinieritas .....	41
4.4.2 Heterokedastisitas .....	42
4.4.3 Autokorelasi .....	42
4.5 Pembahasan dan Analisis .....	43
4.5.1 Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1) terhadap Ketimpangan di Jawa Barat .....	43
4.5.2 . Analisis pengeluaran pemerintah (X2) terhadap Ketimpangan di Jawa Barat .....	44
4.5.3 Analisis Pengaruh Subsidi (X3) terhadap Ketimpangan di Jawa Barat....	45
4.5.4 Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X4) terhadap Ketimpangan di Jawa Barat .....	46
<b>BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI .....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Implikasi .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	53
LAMPIRAN.....	55

## ABSTRAKSI

Ketimpangan wilayah dapat terjadi dalam skala nasional maupun lokal. Ketimpangan wilayah menjadi menarik untuk dibahas karena ketimpangan wilayah merupakan salah satu dampak dari awal pembangunan itu sendiri dan apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak buruk bagi wilayah-wilayah yang tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk analisis factor yang mempengaruhi ketimpangan di Jawa Barat tahun 2001-2017, dengan menggunakan metode regresi berganda untuk membuktikan hipotesis, serta menganalisis variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran pemerintah, Subsidi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap ketimpangan di Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 10 tahun, mulai dari tahun 2001 – 2017 yang di peroleh dari media informasi internet Badan Pusat Statistik, Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan Uji T, Uji F, R<sup>2</sup> dan Asumsi Klasik.

Hasil analisis dari penelitian menunjukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan, Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan, subsidi berpengaruh terhadap ketimpangan, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran pemerintah, Subsidi, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan menjadi suatu proses kegiatan yang dianggap penting dan wajib dilaksanakan oleh semua negara, karena globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah berdampak pada perubahan dan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan manusia. Sehingga dalam proses pembangunan harus mencakup seluruh aspek baik ekonomi maupun sosial. Seperti yang terdapat dalam Todaro (2006:28), menyebutkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi tidak miskin dan menjadi keinginan setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian yang memungkinkan orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial (Dumairy, 1996: 65-66). Untuk mencapai hal tersebut, keberhasilan pembangunan sering diidentikan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Pembangunan dalam lingkup Negara secara spasial tidak selalu berlangsung sistemik. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan oleh karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang trampil di samping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah (Tim P4N-UGM dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, 1997 :1-2).

Persebaran sumberdaya yang tidak merata menimbulkan disparitas dalam laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Ketidakmerataan sumber daya ini tercermin pada konsentrasi kegiatan ekonomi yang terjadi pada daerah tertentu saja. Daerah-daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonomi terjadi memperoleh manfaat yang disebut dengan ekonomi aglomerasi (agglomeration economies). Seperti yang dikatakan oleh Bradley and Gans (1996), bahwa ekonomi aglomerasi adalah eksternalitas yang dihasilkan dari kedekatan geografis dari kegiatan ekonomi. Hubungan positif antara aglomerasi geografis dari kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dibuktikan (Martin dan Octaviano, 2001). Aglomerasi menghasilkan perbedaan spasial dalam tingkat pendapatan. Semakin teraglomerasi secara spasial suatu perekonomian maka akan semakin meningkat pertumbuhannya. Daerah-daerah yang banyak industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah-daerah yang hanya

mempunyai sedikit industri pengolahan. Alasannya adalah daerah-daerah yang mempunyai industri pengolahan lebih banyak mempunyai akumulasi modal. Dengan kata lain, daerah-daerah dengan konsentrasi industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang tidak punya konsentrasi industri pengolahan.

Konsentrasi spasial didorong oleh ketersediaan tenaga kerja yang terspesialisasi dimana berkumpul perusahaan pada suatu lokasi akan mendorong berkumpulnya tenaga kerja yang terspesialisasi, sehingga menguntungkan perusahaan dan tenaga kerja. Selain itu, berkumpulnya perusahaan atau industri yang saling terkait akan dapat meningkatkan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan input yang terspesialisasi yang lebih baik dan lebih murah. Jarak yang tereduksi dengan adanya konsentrasi spasial akan memperlancar arus informasi dan pengetahuan (knowledge spillover) pada lokasi tersebut (Mudrajad, 2002)


Pemerataan hasil-hasil pembangunan adalah salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan melalui konsentrasi spasial (klaster), Kabupaten Sumedang kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu pada sektor industri. Dari tahun ke tahun pertumbuhan PDRB dari sektor industri juga terus meningkat dibanding sektor yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri di Kabupaten Semarang sangat berpotensi untuk terus dikembangkan.

Kesenjangan sering kali terjadi di suatu wilayah dan menjadi permasalahan yang cukup serius. Barika (2010) daerah yang mengalami ketimpangan disebabkan salah satunya kekurangan sumber daya yang tidak



dimiliki, karena cenderung para investor memilih daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti halnya yang ada di perkotaan dan tidak ada di pedesaan. Budi Satrio (2013) perencanaan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah sangat diperlukan agar tujuan pembangunan yakni meningkatkan perluasan distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok, dan peningkatan standar dan kualitas hidup masyarakat dapat terwujud secara bersamaan baik pada tingkat regional maupun nasional.

Tabel 1.1 Indeks Gini Provinsi Jawa tahun 2007-2017



KETIMPANGAN DI JAWA						
TAHUN	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	JAWA TENGAH	DI YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	BANTEN
2007	0.367	0.355	0.349	0.367	0.348	0.356
2008	0.362	0.354	0.332	0.368	0.345	0.344
2009	0.356	0.378	0.331	0.367	0.333	0.357
2010	0.361	0.357	0.357	0.404	0.335	0.419
2011	0.402	0.39	0.372	0.418	0.358	0.388
2012	0.437	0.431	0.391	0.451	0.384	0.381
2013	0.404	0.424	0.404	0.42	0.386	0.376
2014	0.436	0.412	0.407	0.444	0.428	0.435
2015	0.421	0.446	0.402	0.428	0.428	0.39
2016	0.397	0.412	0.382	0.423	0.433	0.399
2017	0.409	0.399	0.383	0.447	0.442	0.38

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa ketimpangan di Jawa Barat tertinggi di tahun 2015 yaitu 0,30972 kemudian terus menurun, dan untuk dibandingkan dengan provinsi lain di tahun 2017 tertinggi setelah Yogyakarta, Jawa Timur dan Jakarta. Ketimpangan antar daerah di Indonesia, selain warisan historis, juga karena kebijaksanaan pembangunan selama ini lebih menekankan kepada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar golongan masyarakat

serta belum signifikan dalam memfokuskan pemerataan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan ini diperkuat pula oleh perbedaan karakteristik wilayah, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta kelengkapan infrastrukturnya. Hasil studi Kuncoro (2004) menyimpulkan adanya perbedaan dalam laju pertumbuhan antara daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya: kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas yang lengkap seperti: prasarana perhubungan, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang trampil; disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah.

Tujuan otonomi daerah untuk pembangunan dengan pemerataan masih belum berhasil karena pembangunan masih selalu terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Adanya perbedaan inilah yang memicu adanya ketimpangan pendapatan antar masyarakat khususnya di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat. Berdasar latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian ini. Melalui penelitian ini penulis akan melihat perkembangan tingkat ketimpangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat pasca orde baru dan penulis ingin mengetahui keterwujudan cita-cita pembangunan melalui reformasi pascakrisis 1998, dua hal inilah yang memberikan warna khusus pada penelitian ini dan menjadikan

Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan

yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro,2004). Ketimpangan menyebabkan inefisiensi ekonomi, sebab ketimpangan yang tinggi, tingkat tabungan secara keseluruhan di dalam perekonomian cenderung rendah, karena tingkat tabungan yang tinggi biasanya ditemukan pada kelas menengah. Meskipun orang kaya dapat menabung dalam jumlah yang lebih besar, mereka biasanya menabung dalam bagian yang lebih kecil dari pendapatan mereka, dan tentunya menabung dengan bagian yang lebih kecil lagi dari pendapatan marginal mereka (Todaro, 2006). Dampak negatif inilah yang menyebabkan ketimpangan yang tinggi menjadi salah satu masalah dalam pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan di suatu wilayah.

Daerah-daerah yang relatif kaya mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Suatu pertumbuhan ekonomi selain dapat dilihat dari jumlah output total yang tinggi juga dapat tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari masing-masing daerah.

Penelitian ini perlu untuk dilaksanakan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2001-2017?
2. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2001-2017?
3. Bagaimana Pengaruh Subsidi Pemerintah Terhadap Ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2001-2017?
4. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2001-2017?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Barat.
2. Menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Barat.
3. Menganalisis Pengaruh Subsidi Pemerintah Terhadap Ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Barat.
4. Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketimpangan antar kabupaten di Jawa Barat.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ;

1. Bagi penulis sebagai proses pembelajaran dan penerapan ilmu yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah ekonomi regional.

2. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi pada penelitian selanjutnya  
Para pengusaha dan pemerintah sebagai bahan informasi dalam merumuskan penentuan lokasi industri agar keuntungan tiap industri maksimum.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Isi dari Pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Kajian pustaka merupakan pengkajian dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Sedangkan landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, definisi operasional, metode pengumpulan data, metode analisis data dan cara pengolahan data yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Dalam bab ini terdapat dua subbab yaitu diskripsi data penelitian yang berupa pemaparan data yang digunakan dalam penelitian dan hasil serta analisis yang merupakan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian.

## BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan merupakan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Implikasi merupakan hasil dari simpulan yang digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan variabel serta analisis dalam penelitian ini, maka perlu kiranya merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang ketimpangan.

Penelitian Diana Wijayanti yang meneliti tentang Analisis Kesenjangan Pembangunan Regional: Indonesia, 1992-2001 dengan menggunakan Metode Regresi dan Indeks Theil. Variabel dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita non migas, angkatan kerja, Jumlah penduduk pendidikan menengah, Konsentrasi Industri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif tingkat ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 1995-2008 masih tinggi. Sedangkan Hipotesis Kuznets terbukti pada wilayah ini.

Penelitian Nurhuda dkk (2012) tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011), penelitian tersebut menggunakan variabel PDRB, PAD, DAU, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan, dan metode yang digunakan Metode Williamson, Hipotesis Kuznets. Hasil dari penelitian ini, pertama ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan dan tergolong rendah. Kedua Hipotesis Kuznets tentang U-terbalik berlaku di Provinsi Jawa Timur pada tahun

2005-2011. Ketiga PAD yang semakin besar dan merata mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan.

Penelitian Musfidar (2012) dalam skripsinya membahas tentang Ketimpangan distribusi Pendapatan dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu Populasi penduduk, Upah Minimum Regional (UMR) dan kontribusi sektor industri dengan metode Regresi Berganda dengan hasil UMR di Propinsi Sulawesi selatan berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga UMR ditetapkan oleh pemerintah dengan angka yang cukup tinggi agar dapat mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Kontribusi sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, artinya kontribusi

Penelitian Rosa & Sovita (2016) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi data panel dengan jumlah data time series 7 tahun yaitu tahun 2009-2015 dan data cross section 6 Provinsi . Hasil yang diperoleh bahwa pengaruh PDB, populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan yaitu positif dan signifikan. Variabel independen dalam penelitian ini mampu menggambarkan terjadinya ketimpangan pendapatan sebesar 78,59% dan sisanya yaitu 21,41% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen



No	Judul/tahun/peneliti	Variabel dan metode analisis	Kesimpulan
1	<p>Analisis Kesenjangan Pembangunan Regional : Indonesia, 1992-2001</p> <p>Jenis : Skripsi Peneliti : Diana Wijayanti</p>	<p>PDRB per kapita non migas, angkatan kerja, Jumlah penduduk pendidikan menengah, Konsentrasi Industri</p> <p>Metode Regresi dan Indeks Theil</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif tingkat ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 1995-2008 masih tinggi. Sedangkan Hipotesis Kuznets terbukti pada wilayah ini.</p>
2	<p>Nurhuda dkk (2012). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)</p>	<p>PDRB, PAD, DAU, dan IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan</p> <p>Metode Williamson, Hipotesis Kuznets</p>	<p>1. Ketimpangan pembangunan di Provin-si Jawa Timur mengalami penurunan dan tergolong rendah 2. Hipotesis Kuznets tentang U-terbalik berlaku di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005-2011, 3. PAD yang semakin besar dan merata mendorong terjadinya pening-katan pertumbuhan</p>
3	<p>Musfidar (2012) dalam skrpisnya membahas tentang Ketimpangan Distribusi Pendapatan dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu Populasi penduduk, Upah Minimum Regional (UMR) dan kontibusi sektor industri.</p>	<p>POPULASI, UMR, UPAH Terhadap ketimpangan</p> <p>Metode Regresi Berganda</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah UMR di Propinsi Sulawesi selatan berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga UMR di tetapkan oleh pemerintah dengan angka yang cukup tinggi agar dapat mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Kontribusi sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendaptan, artinya kontribusi</p>

4	Rosa & Sovita (2016) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Alat	analisis yang digunakan yaitu regresi data panel dengan jumlah data time series 7 tahun yaitu tahun 2009-2015 dan data cross section 6 Provinsi	. Hasil yang diperoleh bahwa pengaruh PDB, populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan yaitu positif dan signifikan. Variabel independen dalam penelitian ini mampu menggambarkan terjadinya ketimpangan pendapatan sebesar 78,59% dan sisanya yaitu 21,41% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen
---	--	---	--

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Ketimpangan pembangunan yang terjadi antar wilayah di suatu daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Menurut (Syafrizal, 2008) ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju (develop region) dan wilayah terbelakang. (underdeveloped region).

Menurut Mudrajat Koncoro (2003), kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda,

sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (sukirno,2003).

Menurut Mydral (dalam Arsyad, 2004). Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan mengakibatkan pengaruh yang menguntungkan (spread effects) yang dalam hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan kesenjangan antar daerah miskin di mana industri modern tidak pernah dapat berkembang dalam berbagai skala umumnya di tandai dengan daerah pertanian dengan usaha tani subsisten dan kecil, berpenduduk jarang dan tersebar dan tidak terdapat kota atau konsentrasi pemukiman yang relatif besar. Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. (Syafirizal,2008).

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerahdaerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan

antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2004).

### **2.2.2. Ketimpangan antar Propinsi**

Menurut Sjafrizal (2012), ketimpangan antar daerah (propinsi) merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bila mana pada setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (developed region) dan wilayah relative terbelakang (underdeveloped region). Namun dengan adanya ketimpangan dari penyebab adanya pembangunan di setiap daerah, perlu adanya evaluasi untuk merumuskan kebijakan agar ketimpangan antar daerah tidak terjadi.

### **2.2.3. Teori Ketimpangan Wilayah**

Ada dua teori ketimpangan wilayah, yaitu Dampak Balik (Trickling Down – Polarization Effect) serta Dampak Sebar Backwash – Spread Effect.

#### **1. Trickling Down – Polarization Effect**

Albert O. Hirschman (1970) dalam tulisannya yang berjudul *Interregional and International Transmission of Economic Growth*, membedakan daerah di suatu negara menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara ke dua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik

(trickling down effect). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin melebar berarti terjadi proses pengkutuban (polarization effect).

## **2. Backwash – Spread Effect**

Myrdal dalam Jhingan (1990), menyatakan bahwa ketimpangan regional dalam suatu negara berakar pada dasar nonekonomi. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalisasi yang dilandaskan oleh motif laba. Motif laba itulah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah – wilayah yang memiliki “harapan laba tinggi”, sementara wilayah – wilayah lain terlantar.

Myrdal memberikan penjelasan bahwa pertumbuhan suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah - wilayah disekitarnya, pengaruh tersebut terjadi melalui dampak balik (backwash effect) dan dampak sebar (spread effect). Dampak balik (backwash effect) terjadi pada saat pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu mengakibatkan berpindahnya sumber daya (misalnya tenaga kerja, modal, dan sebagainya) dari wilayah disekitar wilayah tersebut. Hal ini akan mengakibatkan wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi tadi akan semakin maju dari wilayah disekitarnya dan wilayah sekitar akan semakin tertinggal.

Dampak sebar (spread effect) terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mengakibatkan pertumbuhan wilayah di sekitarnya yang memproduksi bahan mentah untuk keperluan industri yang sedang tumbuh di sentra – sentra tersebut dan sentra – sentra yang mempunyai industri barang –

barang konsumsi akan terangsang. Selanjutnya Myrdal menyimpulkan bahwa ketimpangan wilayah diakibatkan oleh lemahnya dampak sebar dan kuatnya dampak balik.

#### **2.2.4 Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah**

Ada beberapa factor yang menentukan ketimpangan antar wilayah, antar lain yaitu (syafrijal, 2008):

##### **a. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam**

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relative murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah.

##### **b. Perbedaan Kondisi Demografis**

Faktor lainnya yang juga mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi

demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relative rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah.

#### c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan.

Demikian pula halnya migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

d. Kosentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya kosentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat kosentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kosentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena adanya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi kosentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga



ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi jika sebaliknya dimana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut.

### **2.2.5 Macam-macam Belanja Pemerintah**

Menurut macamnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 2, yaitu menurut organisasi dan menurut sifat. Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan menjadi 3, yakni :

#### **a. Pemerintah Pusat**

Dalam pemerintah pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi 2 yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dll. Juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana

perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dll.

#### b. Pemerintah Provinsi

Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga.

#### c. Pemerintah Kabupaten/Kota

APBD dalam Kabupaten/Kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan, Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan, bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan, pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari, pembayaran Pokok Pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya.

## **2.2.6 Pengaruh Pengeluaran Negara Terhadap Perekonomian**

Dalam pengeluaran negara, dapat menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain :

### **a. Sektor Produksi**

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat pengeluaran negara merupakan faktor produksi (money), melengkapi faktor-faktor produksi yang lain (man, machine, material, method, management). Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat.

### **b. Sektor Distribusi**

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dll. Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik,

diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

#### c. Sektor Konsumsi Masyarakat

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun.

#### d. Sektor Keseimbangan Perekonomian

Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment). Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran.

## **2.2.7 Pertumbuhan Ekonomi**

### **Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.<sup>2</sup>

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Menurut Prof. Simon Kuznets<sup>4</sup>, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian

### **2.2.8 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu<sup>10</sup> :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

- 1 Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai

badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

- 2 Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan 9Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Pemerintahan Daerah 10Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- 3 Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah

adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatandaerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

### **2.2.8 Teori Subsidi**

Subsidi adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat (Zarkasih, 2010). Menurut Handoko dan Patriadi (2005) subsidi merupakan pembayaran yang diberikan pemerintah kepada badan usaha maupun rumah tangga dengan harapan tercapainya kondisi yang lebih baik. Subsidi dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Subsidi langsung dapat berbentuk uang tunai, pinjaman bebas bunga dan sebagainya sedangkan subsidi tidak langsung berbentuk pembebasan penyusutan, potongan sewa dan semacamnya. Menurut Rini (2006) subsidi dapat berbentuk:

1. Subsidi produksi, dimana pemerintah menutup sebagian biaya produksi untuk mendorong peningkatan output produk tertentu dan dimaksudkan untuk menekan harga dan memperluas penggunaan produk tersebut.
2. Subsidi ekspor, yang diberikan pada produk ekspor yang dianggap dapat membantu neraca perdagangan negara.
3. Subsidi pekerjaan, yang diberikan untuk membayar sebagian dari beban upah perusahaan agar dapat diserap lebih banyak pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

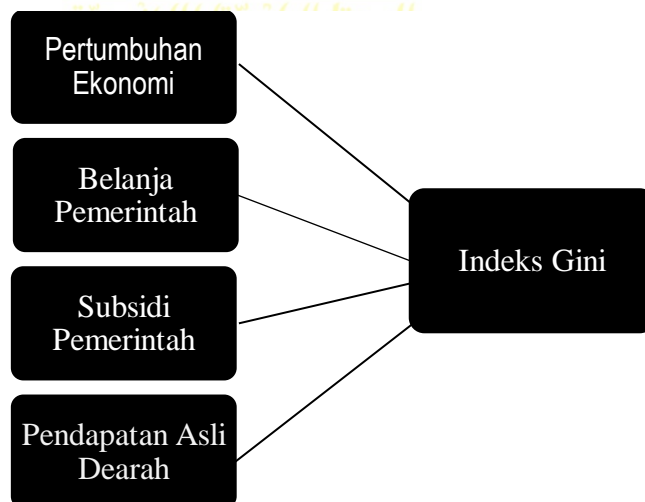
4. Subsidi pendapatan, yang diberikan melalui sistem pembayaran transfer pemerintah untuk meningkatkan standar hidup minimum sebagian kelompok tertentu seperti tunjangan hari tua dan lainnya. Sesuai dengan uraian diatas maka subsidi uang tunai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subsidi produksi, dimana peningkatan output produknya ditanggung oleh pemerintah dengan cara menanggung sebagian biaya produksi yaitu pupuk organik dan benih unggul agar harga jual kepada masyarakat dapat dicapai.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependent (terikat)

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**





## 2.4. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan di Jawa Barat.
2. Diduga Belanja Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan di Jawa Barat.
3. Diduga Subsidi Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan di Jawa Barat.
4. Diduga Pendapatan Asli Daerah Pertanian berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan di Jawa Barat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data**

##### **3.1.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang terdiri dari variable independen yaitu pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, subsidi pemerintah dan pendapatan asli daerah. Sedangkan variabel dependen yaitu indeks gini tahun 2001-2017 yang diperoleh data-data statistik yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis berganda atau dapat disebut Ordinary Least Square (OLS) yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam penelitian tersebut serta untuk menjawab masalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

##### **3.1.2 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Cara pengumpulan data dapat dilakukan melalui dengan dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang memberikan keterangan langsung kepada pengumpul data sedangkan data yang tidak secara langsung memberikan keterangan kepada pengumpul data, data yang didapat melalui sebuah instansi, lembaga atau sebuah dokumen, seperti yang telah disebutkan bahwa data-data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk pencatatan atau data dalam

angka dari berbagai sumber. Data tersebut disusun mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 yang kemudian dimasukkan ke dalam variabel independen dan variabel dependen.

### **3.2 Definisi Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah segala sesuatu berbentuk variabel atau sumber apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, selain itu juga dapat diterapkan sehingga dapat berguna dikemudian hari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 2) penelitian ini memiliki variabel penelitian sebagai berikut:

#### **3.2.1 Variabel Dependent (Y)**

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama

#### **3.2.2 Variabel Independen (X)**

- a. Pertumbuhan Ekonomi adalah adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dalam penelitian ini Pertumbuhan Ekonomi menggunakan satuan persen

- b. Belanja Pemerintah adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Negara terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat, dan Transfer ke Daerah.
- c. Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah).
- d. Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

### 3.3 Teknis Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda atau bisa disebut dengan Ordinary Least Square (OLS). Dengan tujuan untuk melihat hasil penelitian dengan formulasi sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Indeks Gini

X1 = Pertumbuhan Ekonomi

X2 = Belanja Pemerintah

X3 = Subsidi Pemerintah

X4 = Pendapatan Asli Daerah

### 3.3.1 Pemilihan Model

Pemilihan model regresi bertujuan untuk menentukan apakah model yang digunakan berbentuk linier atau log linier. Dalam penelitian ini dalam memilih model regresi menggunakan uji MWD (*MacKinnon, White, and Davidson*). Model linier dan log linier yang digunakan dalam permintaan uang di Indonesia adalah sebagai berikut:

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa:

- $H_0 = Y$  adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)
- $H_a = Y$  adalah fungsi log linier dari variabel independen X (model log linier).

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut:

- a. Estimasi persamaan (1) dan (2), kemudian nyatakan  $F_1$  dan  $F_2$  sebagai nilai prediksi atau *fitted value* dari persamaan (1) dan (2).
- b. Dapatkan nilai  $Z_1 = \ln F_1 - F_2$  dan  $Z_2 = \text{antilog } F_2 - F_1$ .
- c. Estimasi persamaan (3) dan (4) dengan memasukkan  $Z_1$  dan  $Z_2$  sebagai variabel penjelas
- d. Dari langkah (c) di atas, jika  $Z_1$  pada model linier signifikan secara statistik, maka kita menolak hipotesis nol sehingga model yang tepat adalah log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nol sehingga model yang tepat adalah linier. Jika  $Z_2$  signifikan

secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif sehingga model yang tepat adalah linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternative sehingga model yang tepat adalah log linier (Widarjono, 2009:75).

### 3. 4 Evaluasi Hasil Regresi

#### 3.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien  $R^2$  digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data yang aktualnya (goodness of fit). Artinya semakin besar  $R^2$  pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen nilai koefisien determinasi berkisar angka 0 dan 1 yang artinya jika mendekati angka nol maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen itu terbatas dan sebaliknya jika mendekati angka 1 maka variabel independen cukup mampu menjelaskan variabel dependen. Dengan formulasi sebagai berikut

$$R^2 = (TSS - SSE) / SSR / TSS$$

Persamaan diatas menunjukkan proporsi total jumlah kuadrat (TSS) yang diterangkan oleh variabel independen dalam model tersebut. Sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lain atau variabel yang tidak terikat dalam model yang digunakan (Mendenhall et. Al. dalam Kuncoro, 2007:84).

### 3.4.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan asumsi bahwa “jika  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  maka menolak  $H_0$  dan sebaliknya jika  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  maka menerima  $H_0$  dengan derajat kepekaan atau nilai probabilitas  $\alpha = 0.05$  atau 5% yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Menentukan hipotesis dimana yang sudah dijelaskan pada penjelasan diatas.
2. Menghitung nilai F-hitung  $\frac{ESS/(k-1)}{SRR/(n-k)}$

### 3.4.3 Uji T

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar dan seberapa jauh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel dependen lainnya adalah tetap.

1. Hipotesis yang digunakan melalui uji hipotesis satu sisi

- a. Jika hipotesis positif

$$H_0 : \beta_i \leq 0$$

$$H_a : \beta_i > 0$$

- b. Uji hipotesis satu sisi

Jika  $T_{tabel} \geq t_{hitung}$  maka  $H_0$  diterima berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen sebaliknya,

Jika  $t\text{-tabel} < t\text{-hitung}$  maka  $H_0$  ditolak berarti variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak dari model yang digunakan untuk penelitian tersebut. Maka harus dilakukan uji asumsi klasik.

#### 3.5.1 Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan suatu linier sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Kuncoro, 2007:98). Selain itu Multikolinieritas merupakan hubungan antara variabel independen didalam regresi berganda (Widarjono: 2010). Deteksi multikolinieritas dapat diketahui melalui korelasi parsial antar variabel independen atau dengan kata lain (Rule of Thumb). Dilakukan dengan metode Klein yaitu dengan mengasumsikan jika nilai koefisien di atas 0.85 maka terdapat multikolinieritas dan sebaliknya jika  $<$  nilai koefisien  $>$  8.85 maka model tidak mengandung multikolinieritas atau dengan cara melihat adanya multikolinieritas. Jika nilai  $R^2$  auxelery lebih kecil dari koefisien regresi aslinya maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur multikolinieritas. (Widarjono: 2010).



### 3.5.2 Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan varian dari error terms ( $e_i$ ) konstan. Adanya heteroskedastisitas menyebabkan estimator  $\beta_1$  metode OLS tidak lagi mempunyai varian yang minimum atau dengan kata lain tidak lagi BLUE. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya unsur heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara:

Pengujian dengan metode *White*. White dapat dijelaskan dengan model dua variabel dependen yaitu:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + e_i$$

Dengan langkah-langkah berikut

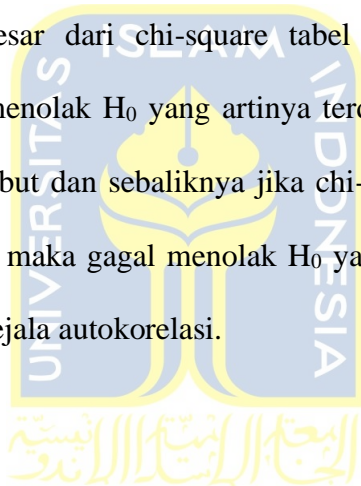
- a) Estimasi persamaan model dan dapatkan residualnya
- b) Lakukan regresi pada persamaan berikut yang disebut regresi auxiliary
- c) Hipotesis nol dalam uji ini adalah tidak ada heteroskedastisitas. Uji-white didasarkan pada jumlah sampel ( $n$ ) dikalikan dengan  $R^2$  yang akan mengikuti distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebanyak variabel dependen tidak termasuk konstanta. Nilai hitung chi-squares dapat di cari dengan formula

- a.  $\chi^2 = n \cdot R^2 \sim \chi^2$

- d) Jika nilai chi-squares hitung lebih besar dari nilai  $\chi^2$  kritis dengan derajat kepercayaan tertentu ( $\alpha$ ) maka signifikan sehingga ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-squares hitung lebih kecil dari nilai  $\chi^2$  kritis maka tidak signifikan sehingga tidak ada heteroskedastisitas. (Widarjono, 2010).

### 3.5.3 Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara variabel gangguan satu observasi dengan gangguan observasi lainnya bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2009 :79) dengan metode LM untuk mengetahui adanya autokorelasi atau tidak pada model tersebut. Dengan memperlihatkan nilai chi-square dan chi-square tabel. Jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel dengan tingkat kepercayaan tertentu maka menolak  $H_0$  yang artinya terdapat gejala autokorelasi pada persamaan tersebut dan sebaliknya jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel maka gagal menolak  $H_0$  yang artinya persamaan tersebut tidak terdapat gejala autokorelasi.



## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Seluruh data yang dipergunakan dalam analisis metode ini adalah data sekunder deret waktu (*time series*) yang dalam penelitian tahunan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2017 dan penelitian ini dilakukan di ruang lingkup makro Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen Ketimpangan di Jawa Barat terhadap variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah, Subsidi Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah. Model yang dipergunakan sebagai alat analisis adalah metode *Analisis berganda* digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini menggunakan aplikasi yang cukup populer yaitu EViews.

#### 4.2 Hasil dan Analisis

##### 4.2.1 Hasil Pemilihan Model

Hasil uji MWD untuk model linier dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

#### 4.2.1.1 Uji MWD Untuk Regresi Linier

**Tabel 4.1 Uji MWD Untuk Regresi Linier**

Dependent Variable: Y  
Method: Least Squares  
Date: 01/29/20 Time: 16:05  
Sample (adjusted): 2003 2017  
Included observations: 14 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.53E+09	3.95E+09	0.894616	0.3971
X1	-1.06E+10	6.31E+09	-1.682645	0.1309
X2	-7.54E+08	5.64E+08	-1.336421	0.2182
X3	-0.975402	0.844461	-1.155059	0.2814
X4	2.105012	0.093310	22.55941	0.0000
Z1	-2.85E+09	1.08E+09	-2.643169	0.0296
R-squared	0.987715	Mean dependent var		1.25E+10
Adjusted R-squared	0.980036	S.D. dependent var		1.05E+10
S.E. of regression	1.49E+09	Akaike info criterion		45.37306
Sum squared resid	1.76E+19	Schwarz criterion		45.64694
Log likelihood	-311.6114	Hannan-Quinn criter.		45.34771
F-statistic	128.6366	Durbin-Watson stat		1.375531
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber :Eviews 9

Berdasarkan hasil uji MWD pada model linier di atas diketahui bahwa nilai Z1 signifikan secara statistik ( $p = 0.0296 < 0,05$ ), sehingga model linier ini tidak baik (Widarjono, 2005).

#### 4.2.1.1 Uji MWD Untuk Regresi Log Linier

Tabel 4.2 Uji MWD Untuk Regresi Log Linier

Dependent Variable: LOG(Y)  
Method: Least Squares  
Date: 01/29/20 Time: 15:48  
Sample: 2001 2017  
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16.51515	0.284803	-57.98805	0.0000
LOG(Y)	-0.972978	0.043717	-22.25648	0.0000
LOG(X1)	-0.993814	0.059485	-16.70683	0.0000
LOG(X3)	-0.166116	0.005494	-30.23631	0.0000
LOG(X4)	1.899918	0.013788	137.7926	0.0000
Z2	1.589435	0.041442	38.35358	0.0000
R-squared	0.999595	Mean dependent var	22.51409	
Adjusted R-squared	0.999411	S.D. dependent var	1.417334	
S.E. of regression	0.034399	Akaike info criterion	-3.631017	
Sum squared resid	0.013016	Schwarz criterion	-3.336942	
Log likelihood	36.86365	Hannan-Quinn criter.	-3.601786	
F-statistic	5430.356	Durbin-Watson stat	2.786989	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber :Eviews 9

Berdasarkan hasil uji MWD model log linier di atas diketahui bahwa nilai Z2 tidak signifikan secara statistik ( $p = 0.0000 < 0,05$ ), sehingga model log linier tidak baik (Widarjono, 2005).

Berdasarkan hasil uji model linier dan linier log ini, dimana hasil uji MWD model linier lebih baik dibandingkan dengan model log linier dikarenakan hasil  $Z1 : 0.0296 > Z2 : 0.0000$  maka model linier yang dianalisis dalam penelian ini

#### 4.2.1 Hasil Regresi

**Tabel 4.3 Hasil Regresi**

Dependent Variable: Y  
Method: Least Squares  
Date: 01/29/20 Time: 16:11  
Sample: 2001 2017  
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.38E+08	3.58E+09	0.150124	0.8832
X1	-4.85E+09	7.56E+09	-0.641440	0.5333
X2	-4.87E+08	5.37E+08	-0.906400	0.3826
X3	-0.886624	0.480874	-1.843777	0.0900
X4	2.083020	0.111884	18.61763	0.0000
R-squared	0.977679	Mean dependent var		1.20E+10
Adjusted R-squared	0.970239	S.D. dependent var		1.09E+10
S.E. of regression	1.87E+09	Akaike info criterion		45.77959
Sum squared resid	4.21E+19	Schwarz criterion		46.02465
Log likelihood	-384.1265	Hannan-Quinn criter.		45.80395
F-statistic	131.4049	Durbin-Watson stat		1.332849
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 9

#### Evaluasi Hasil Regresi

##### 4.3.1 Uji Determinasi R<sup>2</sup>

R<sup>2</sup> untuk menjelaskan seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen. Dari hasil regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil di atas ditemukan bahwa nilai R-square sebesar 0.977679 atau 97%. Dengan ini bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 97%. Sedangkan 3 % dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

### 4.3.2 Uji F

Nilai koefisien f-statistik sebesar 4.422905 sedangkan nilai prob. F-statistik  $0.000000 < 5\%$ . Jadi variabel Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah, Subsidi Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah secara serempak mempengaruhi variabel Indeks Gini Jawa Barat

### 4.3.3 Uji T

Uji t-statistik dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-kritis. Jika nilai t-hitung  $>$  nilai t-kritis maka  $H_0$  ditolak dan akan menerima  $H_a$  dan sebaliknya.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ )

Koefisien variabel dari Pertumbuhan Ekonomi adalah  $-4.85E+09$  sedangkan probabilitas sebesar  $0.5333 > (5\%)$ , Secara statistik menunjukkan bahwa variable Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Gini (Y).

#### b. Belanja Pemerintah ( $X_2$ )

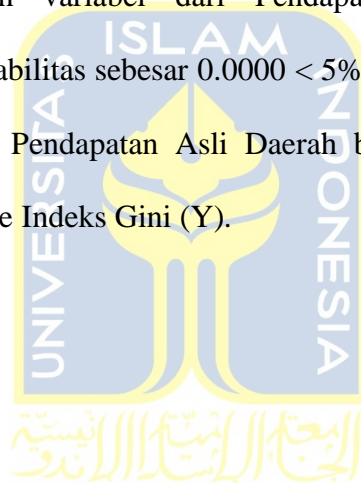
Koefisien variabel dari Belanja Pemerintah adalah  $-4.87E+08$  sedangkan probabilitas sebesar  $0.3826 > (5\%)$ , Secara statistik menunjukkan bahwa variable Belanja Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Gini (Y).

**c. Subsidi Pemerintah (X<sub>3</sub>)**

Koefisien variabel dari Subsidi Pemerintah adalah -0.886624 sedangkan probabilitas sebesar 0.0900 > (5%), Secara statistik menunjukkan bahwa variable Subsidi Pemerintah berpengaruh signifikan negative terhadap variabel Indeks Gini (Y).

**d. Pendapatan Asli Daerah (X<sub>4</sub>)**

Koefisien variabel dari Pendapatan Asli Daerah 2.083020 sedangkan probabilitas sebesar 0.0000 < 5%. Secara statistik menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap variable Indeks Gini (Y).



**4.4 Uji Asumsi Klasik**

**4.4.1 Multikolinieritas**

Untuk menguji ada atau tidaknya gejala multikolinieritas pada model regresi tersebut maka dilakukan dengan cara correlation matrix dengan asumsi bahwa jika angka korelasinya tinggi > 0.85 maka terdapat gejala multikolinieritas dan sebaliknya jika angka korelasi < 0.85 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas.



**Tabel 4.4**  
**Uji Multikolinearitas**

CORELATION

Variance Inflation Factors  
Date: 01/29/20 Time: 16:17  
Sample: 2001 2017  
Included observations: 17

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.28E+19	62.19594	NA
Y	5.71E+19	34.04134	1.352724
X1	2.88E+17	42.33166	1.103004
X3	0.231240	1.623026	1.261411
X4	0.012518	5.410717	1.721591

Sumber: Eviews 9

Dari hasil evaluasi dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas, dengan nilai korelasi dibawah 0.85.

#### 4.4.2 Uji Heterokedastisitas

Untuk mengetahui adanya unsur heterokedastisitas atau tidak maka perlu di uji dengan Uji white dalam program eviews dengan menentukan jika nilai chi-square hitung  $X^2 < X^2$ -tabel, maka terdapat unsur heterokedastisitas atau dengan melihat probabilitas chi-square jika signifikan pada  $\alpha = 5\%$  maka terdapat unsur heterokedastisitas begitu juga sebaliknya.

**Tabel 4.5**

**Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

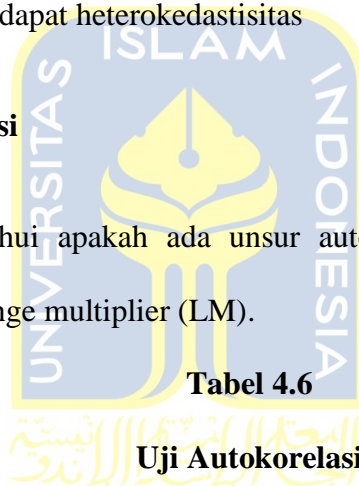
F-statistic	0.957844	Prob. F(4,12)	0.4651
Obs*R-squared	4.114195	Prob. Chi-Square(4)	0.3908
Scaled explained SS	2.158699	Prob. Chi-Square(4)	0.7066

Sumber Eviews 9

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai chi squares-hitung sebesar 0.7066 dengan  $\alpha = 5\%$ , nilai probabilitas chi squares 0.7066 > dari 0.05 sehingga model tersebut tidak terdapat heterokedastisitas

**4.4.3 Uji Autokorelasi**

Untuk mengetahui apakah ada unsur autokorelasi maka perlu diujikan menggunakan uji lagrange multiplier (LM).



**Tabel 4.6**

**Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.400271	Prob. F(2,10)	0.1408
Obs*R-squared	5.513934	Prob. Chi-Square(2)	0.0635

Sumber: Eviews 9

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas chi-squares sebesar 0.0635 nilai probabilitas tersebut melebihi nilai probabilitas 0.05. hal ini menunjukkan bahwa 0.0635 > 0.05. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi.

## **4.5 Pembahasan dan Analisis**

### **4.5.1. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) terhadap Ketimpangan di Jawa Barat**

Hasil estimasi regresi menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan di Jawa Barat.

Pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pembangunan daerah untuk mengelola semua sumber daya yang dimiliki guna mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) serta dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi wilayah yang bersangkutan. Adanya permasalahan dalam pembangunan daerah terletak pada penetapan prioritas kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, dalam hal ini prioritas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berfokus pada pembangunan fisik dan Infrastruktur seperti Jalan Tol, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Drainase dll dan tidak memprioritaskan pada kesejahteraan masyarakat seperti memberi dorongan pada umkm untuk berkembang.

### **4.5.2. Analisis pengeluaran pemerintah ( $X_2$ ) terhadap Ketimpangan di Jawa Barat**

Hasil estimasi regresi menunjukkan Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan di Jawa Barat. Yang berarti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak akan meningkatkan Ketimpangan di Jawa Barat.

Alokasi belanja pemerintah pusat dalam anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) saat ini dinilai belum efektif untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini dikarenakan alokasi anggaran belum seluruhnya tepat sasaran. kondisi belanja yang terjadi saat ini yaitu ada belanja mengikat, belanja rutin yang tidak dapat ditinggalkan apakah belanja pegawai, transfer daerah, pembayaran bunga utang, kewajiban 20% pendidikan, 5% kesehatan dan subsidi yang mau tidak mau masih tetap ada dalam berbagai bentuk dan komoditas pengalokasian anggaran baik belanja barang maupun belanja modal belum memberikan dampak maksimal. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tidak dapat leluasa dalam menurunkan ketimpangan dikarenakan belanja rutin yang harus dilaksanakan. Peranan investasi pemerintah masih dibutuhkan, namun investasi swasta semakin besar. Peran swasta yang semakin besar ini menyebabkan kegagalan pasar juga semakin besar yang pada akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke aktivitas-aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya sehingga pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan.

#### **4.5.3. Analisis Pengaruh Subsidi ( $X_3$ ) terhadap Ketimpangan di Jawa Barat**

Hasil estimasi regresi menunjukkan Subsidi berpengaruh signifikan negative terhadap Ketimpangan di Jawa Barat. Yang berarti bahwa peningkatan Subsidi akan menurunkan Ketimpangan di Jawa Barat.

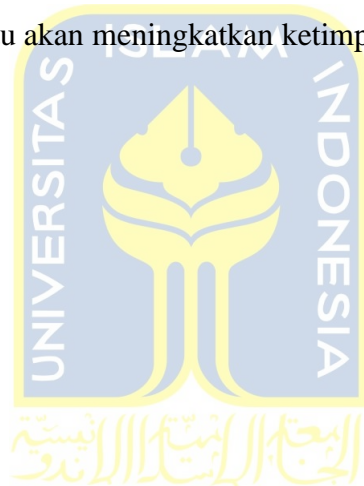
Investasi Pendidikan yang dituangkan dalam bentuk subsidi dianggap memiliki implikasi yang positif terhadap penambahan sumber daya bagi perekonomian, sehingga dapat meningkatkan output secara umum. Oleh karena itu, perubahan dalam pengeluaran bidang pendidikan yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal jangka pendek akan mendukung proses akumulasi dalam modal manusia sehingga pada akhirnya akan mendorong pada pertumbuhan ekonomi dan akan menurunkan ketimpangan. Dengan kualitas SDM yang merata tentu akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan dalam hal ini prioritas subsidi yang dilakukan pemerintah daerah adalah subsidi pada pendidikan.

#### **4.5.4. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( $X_4$ ) terhadap Ketimpangan di Jawa Barat**

Hasil estimasi regresi menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Ketimpangan di Jawa Barat. Yang berarti bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Ketimpangan di Jawa Barat.

Menurut penelitian Gustiana (2014) Pendapatan Asli Daerah disetiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemampuan dibidang industri atau memiliki sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih

besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Jenis pendapatannya meliputi bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan penerimaan yang berupa bagian laba BUMD. Dalam hal ini kinerja BUMD yang baik hanya terdapat di kabupaten yang maju saja dan tentu akan meningkatkan ketimpangan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai analisis ketimpangan di Jawa Barat tahun 2001-2017 dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan di Jawa Barat dikarenakan sebagian besar membuktikan bahwa hubungan negatif antara pertumbuhan dan ketimpangan dalam jangka panjang hanya terjadi pada kelompok negara-negara industri maju. Dalam hal ini yang terjadi di Jawa Barat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat menurunkan ketimpangan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh PMA di sektor industri.
2. Variabel Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan di Jawa Barat dikarenakan Alokasi belanja pemerintah pusat dalam anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) saat ini dinilai belum efektif untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Variabel menunjukkan Subsidi berpengaruh signifikan negatif terhadap Ketimpangan di Jawa Barat dikarenakan Investasi Pendidikan yang dituangkan dalam bentuk subsidi dianggap memiliki implikasi yang positif terhadap penambahan sumber daya bagi perekonomian, sehingga dapat meningkatkan output secara umum.
4. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Ketimpangan di Jawa Barat dikarenakan Pendapatan Asli Daerah disetiap

daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemampuan dibidang industri atau memiliki sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah.

## 5.2 Implikasi

Implikasi yang dapat disampaikan atas temuan empiris dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan angka ketimpangan yang diperoleh, diharapkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat membuat kebijakan yang bertujuan untuk memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan dengan cara memaksimalkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan (seperti memaksimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, pembukaan akses-akses baru dan sebagainya).
2. Bagi Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki nilai ketimpangan distribusi pendapatan di bawah rata-rata, diharapkan segera mengambil kebijakan dan langkah alternatif seperti, peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih produktif. Dengan demikian ketimpangan distribusi pendapatan dapat ditekan.
3. Bagi Pemerintah di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota Jawa Barat dalam upaya menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan perlu memberdayakan sumberdaya internal agar lebih



optimal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan cara ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin.

4. Bagi penelitian selanjutnya yang terkait, diharapkan dapat menambah variabel – variabel lain yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan juga dapat menggunakan model pengujian yang lainnya untuk kesempurnaan penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azizi, M. (2018). The Implication Of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Profit Sharing Fund To Inequality The Gross Regional Domestic Product In South Sulawesi Province Period 2006-2014. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 3(1).
- Barika, B. ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2005–2009. *EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN*, 4(3), 1-11.
- Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Kuncoro, M. (2002). *Analisis spasial dan regional: studi aglomerasi & kluster industri Indonesia*. UPP AMP YKPN.
- Musfidar, M. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan. *E-Jurnal Universitas Hasanuddin Makasar*.
- Nugroho, B. S. (2014). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kecamatan. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 7(1), 46-59.
- Nurhuda, R. (2013). Analisis ketimpangan pembangunan (studi di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 110-119.
- Sari, N. R., & Pujiyono, A. (2013). *analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia tahun 2004-2010* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

- Sovita, Y. D. R. I. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Menara Ekonomi*, 2(4).
- Suseno, D. A. (2015). Pengembangan Daerah Berdasarkan Tipologi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Sektor Di Wilayah Kedung Sepur. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 8(1).
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang Sumatera Barat: Baduose Media.
- Sutarno, & Kuncoro, M. (2003). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Banyumas, 1993-2000. *Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, 97-100.
- Sutawijaya, A. (n.d.). Analisis Tingkat Petumbuhan dan Disparitas antar daerah Pada era Otonomi Daerah. 2-3.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan ekonomi. *Jakarta: Erlangga*.
- Wijayanti, D. (2004). *Analisis kesenjangan pembangunan regional:: Indonesia, 1992-2001* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Widarjono. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Ekonesia.

## LAMPIRAN

### 1. Lampiran Data Mentah

<b>ANALISIS KETIMPANGAN DI JAWA BARAT TAHUN 2007-2017</b>					
<b>Tahun</b>	<b>Indeks Gini</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Pengeluaran Pemerintah</b>	<b>Subsidi</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>
	<b>y</b>	<b>x1</b>	<b>x2</b>	<b>x3</b>	<b>x4</b>
2001	0.301	3.89	756522000	68620000	1211418000
2002	0.305	4.1	1497926000	66960000	1511492000
2003	0.357	4.21	752639694	69339304	2170593640
2004	0.342	5.03	1042319998	92063568	2846800735
2005	0.347	5.6	1346744563	1138599366	3607767565
2006	0.351	6.02	1146356661	1258573472	3748404051
2007	0.247	6.47	5344736747	57354876	4943422332
2008	0.246	6.21	6110959797	60269587	5275051504
2009	0.263	4.19	10243086750	116478816	5577588779
2010	0.248	6.2	11531944465	64605959	7252242913
2011	0.422	6.5	13503602460	39552236	8502643155
2012	0.423	6.5	19881315554	26641086	9982917415
2013	0.423	6.33	22172242154	25717306	12360109870
2014	0.433	5.09	25805636973	31757432	15038153310
2015	0.433	5.05	25314485396	694262769	15851202864
2016	0.423	5.66	26491000000	4358587386	16180205532
2017	0.280	5.29	30542000000	1488695545	16524120918

## 2. Lampiran Data Indeks Gini

Data Indeks Gini Jawa Barat Tahun 2001-2017	
Tahun	Indeks Gini
2001	0.301
2002	0.305
2003	0.357
2004	0.342
2005	0.347
2006	0.351
2007	0.247
2008	0.246
2009	0.263
2010	0.248
2011	0.422
2012	0.423
2013	0.423
2014	0.433
2015	0.433
2016	0.423
2017	0.280

### 3. Lampiran Data Pertumbuhan Ekonomi

Data Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2001-2017	
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2001	3.89
2002	4.1
2003	4.21
2004	5.03
2005	5.6
2006	6.02
2007	6.47
2008	6.21
2009	4.19
2010	6.2
2011	6.5
2012	6.5
2013	6.33
2014	5.09
2015	5.05
2016	5.66
2017	5.29

#### 4. Lampiran Data Pengeluaran Pemerintah

Data Pengeluaran Pemerintah Jawa Barat Tahun 2001-2017	
Tahun	Pengeluaran Pemerintah
2001	756522000
2002	1497926000
2003	752639694
2004	1042319998
2005	1346744563
2006	1146356661
2007	5344736747
2008	6110959797
2009	10243086750
2010	11531944465
2011	13503602460
2012	19881315554
2013	22172242154
2014	25805636973
2015	25314485396
2016	26491000000
2017	30542000000

## 5. Lampiran Data Subsidi

Data Subsidi Tahun 2001-2017	
Tahun	Subsidi
2001	68620000
2002	66960000
2003	69339304
2004	92063568
2005	1138599366
2006	1258573472
2007	57354876
2008	60269587
2009	116478816
2010	64605959
2011	39552236
2012	26641086
2013	25717306
2014	31757432
2015	694262769
2016	4358587386
2017	1488695545



## 6. Lampiran Data Pendapatan Asli Daerah

Data PAD Tahun 2001-2017	
Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2001	1211418000
2002	1511492000
2003	2170593640
2004	2846800735
2005	3607767565
2006	3748404051
2007	4943422332
2008	5275051504
2009	5577588779
2010	7252242913
2011	8502643155
2012	9982917415
2013	12360109870
2014	15038153310
2015	15851202864
2016	16180205532
2017	16524120918